

BAB III

KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENATAN

KAWASAN MALIOBORO TAHUN 2015-2016

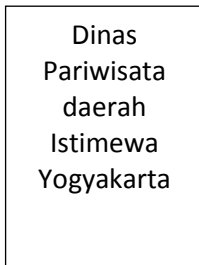
Pada bab ini, akan diuraikan hasil dari penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian yang didapat tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang digunakan berdasarkan definisi operasional pada bab sebelumnya. Dimana hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana proses komunikasi pemerintah Kota Yogyakarta dalam program penataan kawasan Malioboro.

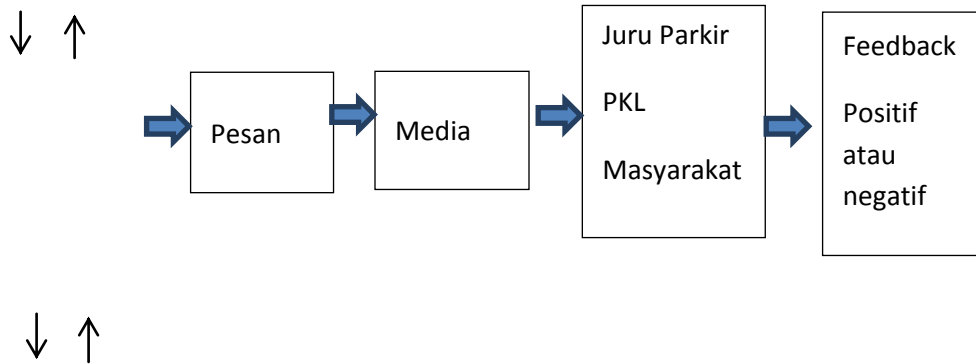
3.1 Proses Komunikasi Pemerintah dalam Penataan Kawasan Malioboro

Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah dilakukan oleh UPT Malioboro berkoordinasi dengan beberapa dinas pendukung dan Pemerintah Provinsi. Proses komunikasi dimulai dengan penyampaian pesan melalui media yang di pilih oleh komunikator dan di terima oleh komunikan. Komunikan menerima pesan ini akan memberikan feedback kepada komunikator.

Selain itu, terjadipula koordinasi antar dinas terkait dalam melakukan komunikasi pemerintahan dalam penataan kawasan malioboro seperti bagan 3.1 tentang proses komunikasi menurut paradigam Lasswel.

Bagan 3.1 Proses Komunikasi menurut Paradigma Lasswel





Sumber : Wawancara Narasumber

Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berkoordinasi dengan dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Yogyakarta dalam melakukan proses komunikasi kawasan penataan malioboro. UPT Malioboro menjadi Komunikator dominan dalam proses ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta No.8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelola Kawasan Malioboro pada Dinas Parieisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

a. Proses komunikasi Pemerintah kepada Paguyuban parkir

Proses komunikasi pemerintah ke paguyuban parkir dilakukan oleh UPT Malioboro dengan mengirim pesan dalam bentuk surat edara kepada ketua paguyuban parkir. Setelah pesan

tersebut di terima, paguyuban parkir memberikan *feedback* kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini mengubah saluran atau media pesan dan memutuskan unruk bertatap muka langsung dengan teman-teman parkir. Pemerintah mengganti saluran dan media penyampaian pesan karena menerima feedback dari paguyuban parkir.

Paguyuban parkir terpecah menjadi dua kubu , terdapat kelompok pro dan kelompok kontra seperti yang dikatakan oleh bapak Sunarto mengatakan :

“Menjelang pembangunan Abu Bakar Ali , akhirnya pemerintah mengajak sharing teman-teman juru parkir , pada saat sharing tersebut sudah ada penolakan dari teman-teman parkir” (Wawancara 13 Januari 2018)

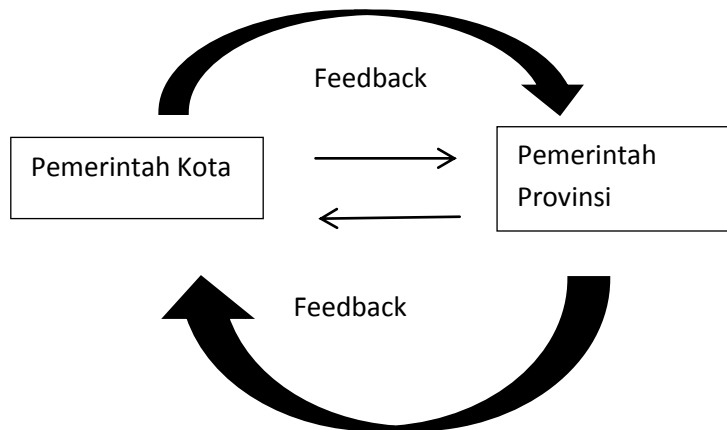
Dalam proses komunikasi yang terjadi didalam penataan kawasan Malioboro sarat dengan kepentingan beberapa pihak. Dimana dalam proses ini , pada objek paguyuban parkir terjadi tarik ulur dalam proses komunikasi. Tarik ulur terjadi selama 6 bulan lamanya, dimana paguyuban parkir dan pemerintah sebagai komunikator tidak menemukan titik temu atau kesepakatan seperti yang dikatakan oleh Bapak Sunarto:

“Pemerintah Provinsi mulai membangun, tanpa melibatkan teman-teman parkir. Dari situ , sampai abu bakar ali selesai ada perintah dari Sultan untuk relokasi. Sampai situlah gejolak dari teman parkir memuncak” (Wawancara 13 Januari 2018)

Namun, Taman Parkir Abu Bakar Ali tetap dibangun tanpa melibatkan paguyuban parkir. Pembangunan ini terjadi karena adanya Koordinasi antar dinas untuk melaksanakan program. Koordinasi ini terjadi karena adanya komunikasi Horizontal antar organisasi yang saling melakukan timbal balik. Seperti yang dikatakan Pak Agus Purnomo S.IP :

“Pemerintah kota dan Pemerintah Provinsi berkerjasama dimana Pemerintah Kota mengurus masalah sosialnya diantaranya Sosialisasi , negosiasi dan perawatan setelahnya. Sedangkan , pemerintah provinsi akan mengurus pengadaan dan pembangunan fasilitas” (hasil wawancara 13 Desember 2017)

Gambar 3.1 Proses Koordinasi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi



Sumber : Wawancara narasumber

Untuk mencapai kata sepakat, pemerintah melakukan lobby kepada masyarakat dengan menjanjikan izin pendirian usaha kepada juru parkir sebagai pengganti dari pekerjaan mereka sebagai juru parkir. Penerbitan izin berdagang ini dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan. Setelah penerbitan izin usaha dagang yang dijanjikan feedback yang diberikan juru parkir sangatlah baik dan mencapai kesepakatan untuk relokasi. Namun, penerbitan izin itu hanya bersifat sementara seperti yang di katakan Pak Narto :

“ Pemerintah Kota telah memberikan izin berjualan kepada eks juru parkir yang ingin di relokasi , izin tersebut sudah diberikan namun tidak ada realisasi. Namun, izin tersebut ditarik lagi dan pemerintah ingkar janji dengan teman-teman parkir. Pesisir yang harusnya jadi tempat berjualan yang dijanjikan tidak ada mba, dan dijadikan tempat duduk untuk wisatwan” (wawancara 18 Januari 2018)

Setelah Taman Pakir Abu Bakar Ali dibangun dan diselesaikan relokasi akhirnya tetap berlangsung dimana 120 orang juru parkir di relokasi ke Taman Parkir Abu Bakar Ali. Teman parkir yang berada di abubakar ali menyampaikan bahwa pendapatan masih tidak pasti sehingga mereka ingin bantuan dari pemerintah. Teman juru parkir masih terus menagih janji dari

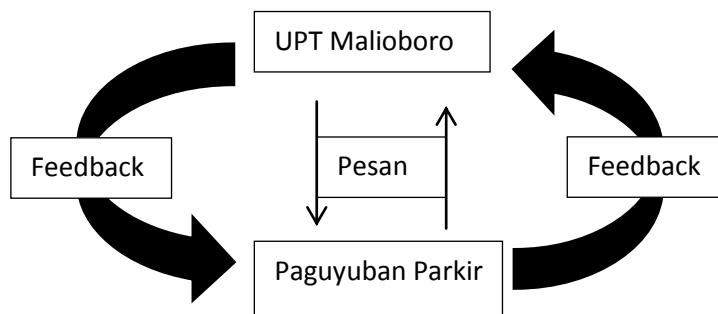
pemerintah tentang penerbitan ijin usaha tersebut namun feedback dr pemerintah tidak baik dan ijin usaha tidak dapat diberikan kembali.

Walaupun tedapat jani-janji politik yang tidak terealisasikan juru parkir bertahan dan melangsungkan pekerjaan di Taman parkir Abu Bakar Ali. Untuk merespon keluhan dari juru parir, maka Juru parkir yang direlokasi ke Taman Parkir Abu Bakar Ali di bina oleh UPT Malioboro seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus Purnomo S.IP selaku Divisi Pemeliharaan, Kebersihan , Pertamanan, Sarana dan Prasarana di Kawasan Malioboro :

“Pemerintah dalam hal ini membina Juru parkir dengan pemberian gaji sebesar 50.000-70.000 perbulan selama kurang lebih 2 bulan.” (Hasil Wawancara tanggal 13 Desember 2017)

Begitu pula proses komunikasi dalam relokasi parkir dalam rangka penataan kawasan Malioboro. Pemerintah kota Yogyakarta dalam hal ini berhasil melakukan komunikasi pemerintah dengan tercapainya relokasi. Pemerintah sebagai komunikator dan Paguyuban Parkir sebagai Komunikan telah melakukan komunikasi dua arah.Dimana , setiap komunikator dan komunikan saling memberikan Feedback dalam setiap proses penyampaian dan penerimaan pesan sehingga terdapat kata sepakat dan proses komunikasi berjalan dengan baik.

Gambar 3.2 proses komunikasi dua arah pada komunikasi UPT malioboro kepada Paguyuban Parkir

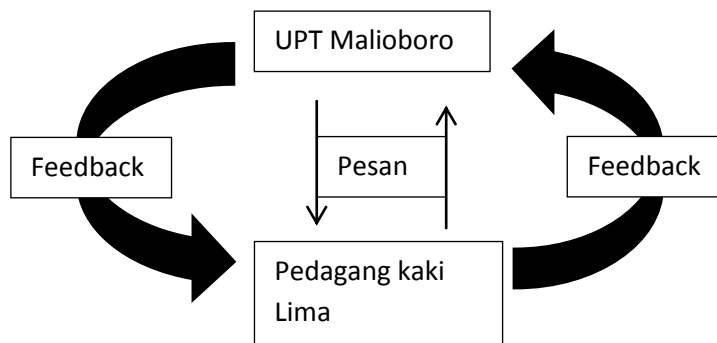


Sumber : Wawancara Narasumber.

b. Proses Komunikasi Pemerintah kepada PKL

Proses Komunikasi Pemerintah kepada PKL memberitahukan bahwa akan ada perbaikan sepanjang pesisir Malioboro dan terjadilah tatap muka antara pemerintah dan PKL.

Gambar 3.3 Proses Komunikasi pemerintah kepada PKL



Sumber : Wawancara Narasumber

Proses komunikasi pemerintah kepada PKL berjalan dengan cukup mulus. Pemerintah melakukan lobby dengan memastikan bahwa PKL tetap dapat berjualan dipesisir malioboro namun pada saat relokasi dan revitalisasi pedestrian terjadi PKL Harus menutup lapak mereka secara bergantian. Pemerintah dan PKL mencapai satu suara dan sepakat. Setelah menerima *feedback* yang baik pemerintah melanjutkan program yang di komunikasikan dan semua berjalan dengan lancar.

c. Proses Komunikasi pemerintah kepada Masyarakat atau wisatawan

Proses komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat berjalan dengan baik. Dengan tercapainya relokasi parkir dari pesisir malioboro ke Taman Parkir Abu Bakar Ali. Pemerintah memasang beberapa spanduk di pertigaan jalan Malioboro dan Abu Bakar Ali untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat. Beberapa Masyarakat yang mengunjungi Malioboro mengetahui relokasi parkir dari sosial media seperti yang di katakan oleh Rurie Mahasiswa yang berkunjung ke kawasan Malioboro:

“Mengetahui ada relokasi sebenarnya dari sosial media , waktu itu ada teman yang share di facebook tentang relokasi parkir , temen ngefoto spanduk pemberitahuan” (wawancara 25 januari 2018)

Proses komunikasi kepada wisatawan juga dibantu oleh PKL yang berjualan di pesisir Malioboro dalam hal perbaikan pedestrian Malioboro. Masyarakat ataupun wisatawan cenderung bertanya kepada para PKL dan Petugas Keamanan yang berjaga di Pesisir Malioboro mengetahui informasi tersebut. Dikatakan oleh Diah seorang Mahasiswa juga yang berkunjung ke Malioboro:

“Tau ada perbaikan Pedestrian kemaren Tanya-tanya sama penjual yang ada disekitar sini sekalian jajan” (Wawancara 25 Januari 2018)

Dalam proses komunikasi terdapat beberapa elemen yang harus ada sesuai dengan proses komunikasi pemerintahan oleh Lasswel sebagai berikut:

3.1.1 Komunikator

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Pengirim informasi ini juga dapat di sebut sebagai komunikator. Dalam komunikasi yang terjadi antar manusia yang terjadi di dunia pada umumnya, komunikator dapat terdiri hanya dari satu orang saja atau sebuah lembaga.

Dalam proses komunikasi pemerintahan menurut Laswell yang berperan sebagai komunikator tentunya adalah pemerintah yang diwakilkan oleh lembaga ataupun dinas terkait yang melakukan komunikasi. Dalam proses penataan kawasan malioboro ini, UPT Malioboro yang bertugas menjadi komunikator.

Terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta No.8 tahun 2012 tentang pembentukan, susunan kedudukan, fungsi dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penataan dan pengkomunikasian kawasan Malioboro akan ditangani oleh UPT berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan terbitnya Peraturan walikota tersebut maka UPT Malioboro adalah komunikator dalam segala kegiatan penataan kawasan malioboro.

Koordinasi diperlukan seorang komunikator dalam pelaksanaan suatu rencana. Koordinasi merupakan salah satu aspek dalam rangkaian kegiatan dalam mengkomunikasikan pesan kepada komunikan. Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang menghubungkan , yang bertujuan menyelenggarakan setiap langkah kegiatan agar tercapainya tindakan yang tepat agar mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Koordinasi antar unit dalam organisasi adalah hal yang penting. Komunikator dalam hal ini UPT Malioboro berkoordinasi dengan Dinas pendukung yang lain seperti Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan penataan kawasan malioboro. Koordinasi terkait dalam pembagian tugas dimana Pemerintah Kota akan mengkaji dan menangani masalah sosial termasuk didalamnya adalah urusan , sosialisasi , mediasi dan negosiasi. Selain masalah sosial pemerintah Kota juga akan menjadi

pihak yang memrawat dan menjaga sarana prasara yang ada sebelum ataupun setelah pembangunan ataupun penataan terjadi. Sedangkan Pemerintah Provinsi mendapatkan tugas dalam hal pembangunan. Pembangunan yang dimaksud disini adalah melakukan pelelangan dalam penataan pedestrian dan pembangunan taman parkir Abu Bakar Ali.

Tabel 3.1 Komunikator Proses Komunikasi penataan kawasan Malioboro

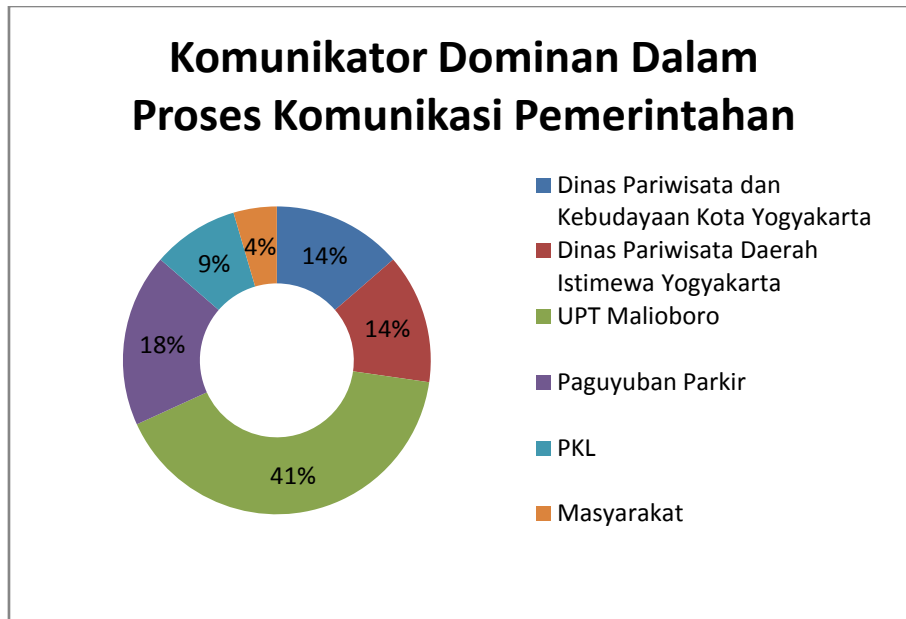
No	Proses Komunikasi Pemerintah	Kasus	Komunikator
1	Sosialisasi 1 Tahun sebelum Relokasi Parkir ke taman parkir Abu Bakar Ali	Parkir	UPT Malioboro
2	Pemberian Undangan untuk tatap muka 6 bulan sebelum relokasi ke taman parkir Abu Bakar Ali	Parkir	UPT Malioboro
3	Sharing atau Tatap muka pertama 6 bulan sebelum relokasi ke taman parkir Abu Bakar Ali	Parkir	UPT Malioboro , Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta,Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Paguyuban Parkir
4	Sharing dan Negosiasi 3 bulan sebelum pembangunan taman parkir Abu Bakar Ali	Parkir	UPT Malioboro, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Paguyuban Parkir
5	Terjadi Loby antara juru Parkir dan UPT Malioboro (berkaitan dengan izin untuk berdagang di pesisir malioboro)	Parkir	UPT Malioboro dan Paguyuban Parkir
6	Terjadi Loby antara UPT Malioboro dan Juru Parkir (Berkaitan dengan pemberian subsidi kepada juru parkir ketika pindah ke taman parkir Abu Bakar Ali selama 3 bulan	Parkir	UPT Malioboro dan Paguyuban Parkir

	dengan nominal Rp.70.000- Rp.50.000)		
7	Memberikan surat undangan berkaitan dengan perbaikan sepanjang pedestrian Malioboro	Pedagang Kaki Lima	UPT Malioboro
8	Sosialisasi dan Negosiasi dalam perbaikan sepanjang pesisir Malioboro	Pedagang Kaki Lima	UPT Malioboro , Dinas Pariwisata Daerah istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Pedagang Kaki Lima
9	Pemberitahuan Relokasi parkir dari pesisir malioboro ke Taman Parkir Abu Bakar Ali dengan memasang spanduk dan menyebarkan informasi melalui media visual , audio dan audiovisual.	Masyarakat atau Wisatawan	UPT Malioboro , Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima

Sumber : Wawancara Narasumber

Tabel Komunikator Proses Komunikasi penataan kawasan Malioboro menunjukkan bahwa UPT Malioboro menjadi Komunikator yang melakukan proses komunikasi paling dominan.

Gambar 3.4 Komunikator Dominan dalam proses komunikasi pemerintah



Sumber : Wawancara Narasumber

Gambar Komunikator dominan dalam proses komunikasi pemerintahan menunjukkan bahwa 41% UPT Malioboro menjadi komunikator dominan dalam melakukan proses komunikasi pemerintahan dalam penataan kawasan Malioboro. Paguyuban Parkir menjadi komunikator kedua dengan perolehan 18% . Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses komunikasi pemerintah mendapatkan perolehan 14% . Partisipasi PKL sebanyak 9% dalam membantu proses komunikasi pemerintahan dalam penataan kawasan malioboro dengan membantu menyebarkan informasi penataan di bantu dengan masyarakat sebanyak 4%.

memperhatikan hal-hal yang membuat komunikasi itu berjalan dengan efektif. Pemerintah sebagai aktor utama dalam proses komunikasi sudah melakukan hal-hal yang menurut Stilman dalam Abidin (2016) dapat membuat komunikasi pemerintah menjadi lebih efektif. Memilih bahasa secara tepat sudah dilakukan Komunikator atau UPT Malioboro. Sehingga, tidak ditemukan bahasa atau penggunaan bahasa sebagai faktor penghambat. UPT Malioboro meminimalisir rintangan dengan menyesuaikan Komunikator dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar mendapatkan outcome dan impact yang baik.

Komunikator dalam hal ini melakukan komunikasi pembangunan dalam Dilla (2012) yang artinya adalah segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan. Komunikasi pembangunan dapat dilihat sebagai rangkaian usaha mengkomunikasikan pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program pemerintah tersebut.

Dalam studikamus penataan kawasan malioboro ini agar diharapkan komunikator dapat menyapaikan rencana dari pemerintah untuk menata kawasan maliobro tersebut agar masyarakat dapat turut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa.

3.1.2 Pesan

Dalam proses komunikasi pemerintah, bila mengkaji model dari Harold Laswell dapat dikatakan Pemerintah Kota yaitu diwakili oleh Unit Pelaksana Teknis sebagai komunikator. Sedangkan Paguyuban Parkir dan para juru parkir dapat dikatakan sebagai komunikan. Pesan dari proses komunikasi pemerintah ini adalah menyapaikan proses penataan kawasan Malioboro

kepada para juru parkir. Seperti komunikasi pada umumnya komunikasi pemerintahan berupa proses pengiriman dan penerimaan pesan, dalam hal ini diharapkan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan.

Pesan yang terdapat dalam proses komunikasi pemerintahan ini ditujukan kepada masyarakat. Terdapat beberapa pesan yang ada di dalam proses penataan kawasan malioboro seperti yang dijabarkan dibawah ini:

- a. Pesan yang pertama adalah pemberitahuan kepada Juru parkir bahwa kegiatan perparkiran akan di relokasi ke taman parkir Abu Bakar ali yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pesan yang kedua adalah informasi perpindahan atau relokasi parkir kepada pejalan kaki di kawasan Malioboro.
- c. Pesan yang ke-tiga adalah pemberitahuan kepada PKL yang bertempat di pesisir malioboro yang didominasi oleh penjual makanan bahwa akan ada renovasi yang dilakukan di sepanjang pedestrian malioboro sehingga PKL harus menutup lapak mereka untuk sementara waktu.
- d. Pesan yang keempat adalah informasi kepada wisatawan dan masyarakat yang mengunjungi Malioboro bahwa akan ada pekerjaan proyek yang tersebar di sepanjang jalan malioboro pada saat renovasi berlangsung agar dapat berhati-hati.

Tabel 3.2 Pesan dalam proses Komunikasi Pemerintah dalaenataan kawasan Malioboro

Kasus	Pesan yang disampaikan
Parkir	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

	Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
PKL	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapatnya galian , bahan bangunan dan tempat yang ditutup disepanjang pedestrian malioboro sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui oleh pejalan kaki. • Relokasi parkir dari pesisir malioboro ke taman Parkir Abu Bakar Ali.

Sumber: wawanacara narasumber

3.1.3 Media / Saluran

Proses pembangunan dan penataan kawasan malioboro membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Penataan kawasan Malioboro dimulai dengan kerjasama pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan komunikasi pemerintah dalam rangka pembangunan yang berguna untuk masyarakat. Komunikasi yang dilakukan pemerintah ini juga termasuk komunikasi pembangunan karena berkaitan dengan mengajak masyarakat turut serta dalam melakukan pembangunan tersebut.

Media yang digunakan dalam proses komunikasi ini adalah media rakyat di mana seperti yang di kemukakan oleh Rangnath dari bukunya yang berjudul *Basic Data* dikutip dalam Dilla

(2012) Komunikasi pembangunan hendaknya setiap bentuk media rakyat harus didasarkan pada kategori bentuk yaitu *audio* , *visual* dan *audiovisual*.

Dalam proses Komunikasi pemerintah dalam penataan kawasan maliobro ini, pemerintah menggunakan media komunikasi eksternal yaitu dengan memasukan pesan kedalam beberapa Media ssebagai berikut :

- a. Media cetak contohnya surat harian Kedaulatan Rakyat. Atau dengan surat edaran yang di cetak langsung oleh pemerintah dan diberikan kepada ketua paguyuban masing-masing paguyuban PKL dan Juru parkir.
- b. Media yang dapat di lihat atau media Visual yaitu pemasangan spanduk di sudut jalan yang ramai seperti pertigaan abu bakar ali.
- c. Media radio yang ada di Yogyakarta.
- d. Dapat juga melalui media sosial seperti Twitter , Instagram dan Facebook yang digunakan kawula muda.

Tabel 3.3Media dalam proses Komunikasi Pemerintah dalam Penataan kawasan Malioboro

Kasus	Media
Parkir	Surat Edaran Pemberitahuan Relokasi, Negosiasi dan tatap muka.
PKL	Negosiasi dan Tatap Muka.
Masyarakat	Radio , Koran KR , Spanduk dan Media Sosial.

Sumber: Wawancara Narasumber

Media dalam proses komunikasi pemerintah dalam penataan kawasan malioboro yang sangat efektif terdapat pada penyampaian pesan menggunakan media audiovisual. Audiovisual disini dapat disimpulkan sebagai tatap muka atau bertemu untuk berkomunikasi secara langsung.

Tatapmuka dalam proses komunikasi memungkinkan komunikator dan komunikan dapat saling berinteraksi dalam memberikan umpanbalik dan respon sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam proses komunikasi.

3.1.4 Komunikan

Komunikan dalam proses Komunikasi adalah penerima pesan. Dalam studi kasus komunikan menerima pesan yang disampaikan. Komunikan dapat berupa suatu organisasi, perorangan ataupun organisasi yang di wakili oleh seorang ketua. Komunikan dalam proses komunikasi ini terdiri dari Juru Parkir , Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat.

Tabel 3.4 Komunikan dalam Proses Komunikasi Pemerintah dalam Penataan kawasan Malioboro

Kasus	Komunikan
Parkir	Ketua Paguyuban Parkir
PKL	Paguyuban PKL
Pedestrian	Wisatawan dan Masyarakat

Sumber: Wawancara Narasumber

Gambar 3.6

Pedagang Kaki Lima dan Wisatawan Malioboro



Sumber : Dok Pribadi

Setiap Juru Parkir dan Pedagang Kaki Lima Mempunyai paguyuban dan ketua paguyuban lah yang akan mewakili teman-teman Juru Parkir dan PKL. Sedangkan , masyarakat yang menjadi komunikan di kawasan malioboro adalah wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung ke kawasan Malioboro datang dari dalam dan luar negeri. Wisatawan juga termasuk komunikan walaupun tidak menetap di malioboro.

3.1.5 *Feedback*

Feedback adalah respon umpan balik yang berupa tanggapan komunikan setelah menerima pesan yang mereka dapatkan dari berbagai media. Bentuk dari *feedback* yang diberikan dalam proses komunikasi dalam penataan kawasan Malioboro adalah opini publik. Opini Publik ini sebagai efek dan pesan yang akan diberikan komunikan kepada komunikator.

Peran dari *feedback* sendiri adalah sebagai acuan bagi komunikator untuk melakukan langkah selanjutnya. Seperti yang kita ketahui *feedback* yang diberikan dapat berupa opini

publik yang positif atau negative. Sehingga bila *feedback* yang diberikan positif maka proses komunikasi dapat di tindak lanjuti dengan program yang dilanjutkan, bila *feedback* negative maka komunikator dapat mencari saluran atau media lain agar proses komunikasi dapat berjalan lebih efektif.

Tabel 3.5 Feedback Proses Komunikasi Pemerintah penataan kawasan Malioboro

Kasus	Feedback setelah menerima pesan	Tindak Lanjut dari Komunikator
Parkir	Negatif - melakukan penolakan	Komunikator memilih bahasa , saluran dan media yang lain,
Pedagang Kaki Lima	Positif – sepakat untuk menutup lapak mereka secara bergantian	Komunikator melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan pentaan kawasan Malioboro.
Masyarakat atau Wisatawan	Positif – Berpindah Parkir ke Taman Parkir Abu Bakar Ali	Komunikator melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan pentaan kawasan Malioboro.

Sumber :Wawancara Narasumber

Beberapa tanggapan ataupun umpan balik tergantung daripada komunikan itu sendiri.

Berikut adalah umpan balik dari komunikan :

3.1.5.1 Feedback Juru Parkir

Paguyuban parkir menerima pesan dari surat edaran yang diberikan kepada ketua paguyuban. Selain menerima surat edaran, enam bulan sebelum pembangunan taman abu bakar ali, pemerintah dalam hal ini UPT Malioboro dan Pemerintah Provinsi mengundang Paguyuban Juru Parkir Malioboro untuk melakukan diskusi guna membahas relokasi parkir. Dalam pertemuan tersebut semua Juru parkir Malioboro dan Paguyuban Juru parkir melakukan diskusi dan membahas proses relokasi parkir ke taman parkir Abu Bakar Ali.

Program kebijakan relokasi parkir terus berjalan walaupun tidak adanya titik temu dan sepakat antara masyarakat dan pemerintah. Dalam kurun waktu enam bulan sebelum pembangunan dari tatap muka atau diskusi pertama negosiasi terus dilakukan oleh pemerintah guna mencapai kesepakatan dengan juru parkir. Juru parkir terus melakukan penolakan dengan mengancam akan terus parkir di sepanjang pesisir Malioboro.

Sampai pada waktu tiga bulan sebelum pembangunan, negosiasi tetap dilakukan namun tidak menemukan titik temu. Akhirnya pemerintah tetap melakukan pembangunan Abubakar Ali. Pembangunan dilakukan walaupun tidak adanya kata sepakat antara Paguyuban parkir dan pemerintah. Tanpa melibatkan paguyuban parkir Abubakar Ali tetap dilaksanakan pembangunannya.

Gambar 3.7

Kondisi Taman Parkir Abu Bakar Ali



Sumber : Dok Pribadi

Umpan balik terjadi berbeda dan terpecah yang positif dan negative. Dalam pertemuan tatap muka pertama dapat disimpulkan, terdapat dua kubu dalam Paguyuban Parkir Malioboro. Dua kubu tersebut yang pertama adalah para juru parkir yang menstujui program relokasi parkir dan kubu yang kedua adalah juru parkir yang tidak menstujui relokasi tersebut.

3.1.5.2 Feedback Pedagang Kaki Lima

Pemberitahuan pembangunan pedestrian PKL disepanjang pesisir Malioboro dilakukan dengan cara negosiasi yang sangat mulus. Semua paguyuban PKL yang berjualan makanan ataupun baju di pesisir malioboro diajak berunding sebelum melakukan pembongkaran untuk memperbaiki pedestrian Malioboro. Disepanjang pedestrian Malioboro terdapat banyak paguyuban. Sebelum melakukan negosiasi dilakukan pemberitahuan kepada semua PKL yang berjualan di sepanjang pesisir Malioboro.

Negosiasi dilakukan UPT Malioboro dan diikuti oleh Paguyuban PKL di pesisir malioboro. Negosiasi ini juga dihadiri oleh pemerintah Provinsi selaku tim pelaksanaan penataan

ulang Malioboro dan semua dinas terkait. Dalam negosiasi ini dijelaskan bagaimana tata cara proses penataan Malioboro. Kesepakatan pedagang yang berjualan di area pedestrian malioboro adalah sistem libur yang bergilir ketika pedestrian di renovasi. Hasil dari pertemuan atau negosiasi tersebut adalah pembongkaran Malioboro bertahap dari muara jalan Malioboro.

Maka, semua Pedagang Kaki Lima mayoritas berjualan makanan setuju untuk menutup lapak ketika penataan berlangsung sekitar tiga sampai tujuh hari sampai penataan atau pembangunan ulang selesai atau sampai kondisi memungkinkan untuk mereka membuka lapak kembali. Namun, untuk wilayah pedagang yang belum terkena penataan tetap dapat berjualan menunggu tempat wilayah mereka menjadi wilayah di perbaiki. Umpan balik yang di berikan oleh PKL setelah menerima pesan sangatlah baik dan positif sehingga proses penataan dapat dilakukan dengan mudah.

3.1.5.3 *Feedback Masyarakat*

Masyarakat dalam hal ini juga termasuk dalam komunikan yang memakai pedestrian Malioboro. Pemerintah Juga melakukan komunikasi kepada Masyarakat, beberapa masyarakat pengguna pedestrian malioboro memberikan umpan balik yang positif. Komunikasi yang berjalan dengan baik terbukti dengan masyarakat yang telah mengetahui renovasi pedestrian dan berhati-hati pada saat proyek berlangsung.

Gambar 3.8 Masyarakat pengguna pedestrian Malioboro



Sumber : Dok Pribadi

3.2 Faktor penghambat komunikasi pemerintahan

Proses komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan pasti mengalami beberapa rintangan atau hambatan sehingga pesan tidak terserap dengan baik oleh komunikan. Faktor penghambat ini dapat menyebabkan konflik yang membuat proses komunikasi terhambat. Faktor penghambat dari ketiga objek berbeda dalam setiap proses pemerintahannya dapat dijelaskan di tabel berikut :

Tabel 3.6 Faktor Penghambat komunikasi Pemerintah

Kasus / Objek	Faktor Penghambat
Parkir	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Bahasa • Pemberian Penafsiran • Perbedaan Status • Ketidaksediaan seseorang memberikan atau menerima informasi • Tekanan • Pembatasan
PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Bahasa • Perbedaan Status
Masyarakat/Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan

Sumber : Wawancara Narasumber

3.2.1 Penggunaan Bahasa

Hambatan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa terdapat pada pesan yang tidak bisa dipahami oleh penerima karena perbedaan tingkat pendidikan , budaya , kultur dan cara penyampaian. Dalam Komunikasi pemerintah dalam penataan kawasan malioboro terjadi hambatan karena kata-kata atau pesan yang sampai kepada komunikan salah di interpretasikan atau dipahami bahasanya. Seperti yang kita ketahui, bahasa yang berada di surat edaran ataupun Peraturan Walikota sedikit sulit dipahami oleh komunikan dalam hal ini Juru Parkir ataupun PKL. Juru parkir dan PKL seperti yang kita ketahui rata-rata memiliki pendidikan yang tidak sampai ke perguruan tinggi, sehingga tidak begitu memahami apa isi dari pesan tersebut.

3.2.2 Pemberian Penafsiran

Pemberian penafsiran berkaitan dengan respon yang berbeda di setiap individu sehingga persepsi informasi berbeda disetiap individu. Dalam komunikasi penataan kawasan Malioboro, terjadi penafsiran yang berbeda dalam paguyuban parkir. Hal itu terbukti dengan terciptanya dua kubu, yaitu yang pro akan relokasi dan yang kontra relokasi parkir. Hal tersebut menjadi penghambat dalam relokasi parkir dari pesisir Malioboro ke taman parkir Abu Bakar Ali.

3.2.3 Perbedaan Status

Perbedaan status terkait dengan pekerjaan ataupun gelar seseorang. Dimana, sebagian informasi bergerak keatas atau kebawah jika terdapat komunikasi antara dua orang yang berbeda status itu akan sangat sulit sehingga dapat terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan bahkan pesan tidak tersampaikan.

Komunikasi pemerintah kota Yogyakarta dalam penataan kawasan Malioboro terkait dengan komunikasi antara komunikator dan komunikan yang berbeda profesi sehingga pesan tidak tersampaikan dengan jelas. Mungkin , pesan yang di sampaikan oleh komunikator

tersampaikan dengan jelas namun umpan balik dari komunikan tidak dapat di sampaikan secara leluasa.

3.2.4 Ketidaksediaan seseorang memberikan atau menerima informasi

Ketidaksediaan seseorang memberikan atau menerima informasi menjadi sebuah penghambat dalam sebuah proses komunikasi. Hal ini terjadi pada saat pesan sudah tersampaikan dan terdapat dua kubu dalam paguyuban parkir yaitu yang pro dan kontra. Kelompok yang kontra terhadap program ini tidak mau menerima informasi yang diberikan oleh Komunikator sehingga negosiasi berjalan alot yaitu dalam kurun waktu 6 sampai 7 bulan lamanya karena ketidaksediaan mereka memberikan atau menerima informasi.

3.2.5 Tekanan-Tekanan

Tekanan dalam penghambat atau rintangan dalam komunikasi pemerintah berkaitan dengan berbagai tekanan dari kelompok kerja , kehidupan sosial dan keadaan hidup. Penghambat dari komunikasi pemerintah adalah tidak adanya tekanan ekonomi, dimana ketidakpastian pendapatan bila relokasi abubakar ali menjadi pertimbangan yang sangat berat.

3.2.6 Pembatasan

Pembatasan dalam hal rintangan komunikasi pemerintahan adalah komunikasi tidak dapat menjangkau pihak yang memiliki informasi dan seluruh anggota paguyuban karena adanya batasan antara keduabelah pihak itu sendiri. Pembatasan ini membuat informasi yang disampaikan komunikator tidak diterima sepenuhnya sehingga terjadi penolakan.

Penolakan dalam Koordinasi Pemerintah ini terjadi karena terdapat empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja antara pemerintah dan Juru Parkir yang menjadi pembatas antara

keduanya. Masalah pelaksanaan koordinasi pemerintah menurut Paul dan Jay dalam Abidin(2016) adalah perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, perbedaan dalam orientasi waktu, perbedaan dalam orientasi antar-pribadi dan perbedaan formalitas struktur. Maka dari keempat hal tersebut yang membuat sebuah koordinasi pemerintahan tidak berjalan dengan lancar.

3.3 langkah strategis untuk mencapai sasaran komunikasi pemerintahan Efektif

3.3.1 Memilih Bahasa, Saluran, dan Media yang tepat.

Langkah strategis untuk mencapai sasaran komunikasi pemerintahan yang efektif telah dilakukan oleh komunikator yaitu UPT Malioboro dengan menggunakan bahasa yang tepat yang dapat diterima komunikan yang disampaikan melalui Ketua paguyuban sehingga mendapatkan outcome dan impact yang diharapkan yaitu semua juru parkir setuju untuk pindah ke dalam Taman Parkir Abu Bakar Ali.

Seperti yang terjadi pada komunikasi kepada PKL yang berjalan dengan lancar, pemerintah menggunakan bahasa dan media yang tepat sehingga tidak terjadi penolakan sehingga, pada saat negosiasi PKL pesisir malioboro sepakat untuk berkerjasama dengan pemerintah dengan melakukan buka tutup bergilir pada saat terjadinya renovasi pedestrian di kawasan malioboro.

Pemerintah juga melakukan komunikasi dengan warga yang berkunjung ke kawasan malioboro. Karena dalam kebijakan ini, bukan hanya tukang parkir yang terlibat namun juga masyarakat dalam hal ini bisa turis asing ataupun wisatawan lokal yang datang dan berkunjung ke kawasan malioboro. Pemerintah melakukan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka memberitahukan bahwa lahan parkir sudah berpindah ke malioboro. hal yang dilakukan

pemerintah adalah berkeja sama dengan media massa, cetak ataupun online dalam memberikan informasi bahwa parkir telah berpindah. Selain itu, pemerintah juga memasang beberapa spanduk yang bertuliskan informasi yang memberitahukan perpindahan parkir dan memasangnya di pusat kota.

3.3.2 Meminimalisir rintangan dalam Komunikasi pemerintahan

Seperti yang kita ketahui ada sedikitnya enam rintangan ataupun hambatan dalam melakukan komunikasi pemerintahan. Dalam hal ini , komunikator yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta diwakilkan oleh UPT Malioboro sebisa mungkin mengurangi hambatan tersebut. Hal itu dilakukan dengan menggunakan bahasa yang tepat agar komunikasi mengerti apa yang ingin di sampaikan oleh pemerintah. Setelah itu , komunikator berusaha mengurangi tekanan yang dirasakan oleh komunikasi dalam hal ini adalah Juru parkir. Hal itu dilakukan dengan memberikan gaji sebagai program pengelolaan juru parkir selama 3 bulan.

3.3.3 Menguasai tentang Praktek Komunikasi Pemerintahan yang Efektif

Menguasai tentang Praktek Komunikasi Pemerintahan yang Efektif berkaitan dengan tatacara melakukan komunikasi dan koordinasi sehingga hambatan dan rintangan dapat minimalisir. Komunikator harus dapat ber inovasi dan mengetahui teknis dalam pembangunan lingkungan sehingga mengetahui masalah-masalah yang ada dilapangan.